# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

## 2.1 Kajian Pustaka

Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai pengertian dan pemahaman efektivitas audit kinerja sektor publik, kualitas penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas publik dengan menganalisa data-data maupun teori yang telah dikumpulkan oleh penulis yang berhubungan dengan efektivitas audit kinerja, kualitas penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas publik.

### 2.1.1 Efektivitas Audit Kinerja

#### 2.1.1.1 Pengertian Efektivitas Audit Kinerja

Menurut Husein Umar (2003:73) menjelaskan definisi efektivitas adalah suatu pengukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kualitas, kuantitas, dan waktu) yang telah tercapai. Menurut Ihyaul Ulum (2009:55) menjelaskan definisi Audit Kinerja Sektor Publik merupakan:

> Pengujian sistematis, teorganisasi, dan objektif atas suatu entitas untuk menilai pemanfaatan sumber daya dalam memberikan pelayanan publik secara efisien dan efektif dalam memenuhi harapan stakeholder dan memberikan rekomendasi guna peningkatan kinerja.

Pengertian Audit Kinerja menurut Indra Bastian (2007:47) adalah sebagai berikut:

> Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas suatu program atau kegiatan pemerintah yang diaudit.

Sedangkan menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:71) pengertian audit kinerja adalah sebagai berikut:

> Audit kinerja merupakan proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif agar dapat dilakukan penilaian secara independen atas ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka efektivitas audit kinerja sektor publik dapat dikatakan sebagai ukuran pemeriksaan yang menunjukkan seberapa jauh tujuan yang telah dicapai dalam suatu program atau kegiatan pemerintah yang diaudit dengan pengujian yang sistematis, teorganisasi, dan objektif terhadap berbagai macam bukti dan dapat melakukan penilaian secara independen, menilai pemanfaatan sumber daya dalam memberikan pelayanan publik secara ekonomi, efisien dan efektif dalam pencapaian hasil yang diinginkan dan kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku, menentukan kesesuaian antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan tersebut guna meningkatan kinerja program atau kegiatan pemerintah yang diaudit.

### 2.1.1.2 Jenis-jenis Audit Kinerja

Menurut Mahmudi (2007:192) audit kinerja mencakup tentang ekonomi, efisiensi, dan program. Berikut masing-masing jenis audit kinerja tersebut, yaitu:

1) Audit Ekonomi dan Efisiensi

Audit ekonomi dan efisiensi menentukan :

- Apakah entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, ruang, dan peralatan kantor) secara hemat dan efisien.
- Apa yang menjadi penyebab timbulnya pemborosan dan inefisiensi.
- Apakah entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penghematan dan efisiensi.

Audit ekonomi dan efisiensi dapat mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit telah:

a) Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan yang sehat.
b) Melakukan pengadaan sumber daya (jenis, mutu, dan jumlah) sesuai dengan kebutuhan dan dengan biaya yang wajar.
c) Melindungi dan memelihara semua sumber daya negara yang ada secara memadai.
d) Menghindari duplikasi pekerjaan atau kegiatan yang tanpa tujuan atau yang kurang jelas tujuannya.
e) Menghindari adanya pengangguran atau jumlah pegawai yang berlebihan.
f) Menggunakan prosedur kerja yang efisien.
g) Menggunakan sumber daya (staf, peralatan, dan fasilitas) secara optimum dalam menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa dengan kuantitas dan kualitas yang baik serta tepat waktu.

h) Mematuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perolehan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya negara.

i) Telah memiliki suatu sistem pengendalian manajemen yang memadai untuk mengukur, melaporkan, serta memantau kehematan dan efisiensi pelaksanaan program.

j) Telah melaporkan ukuran yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai penghematan dan efisiensi.

2) Audit Program

Audit program mencakup penentuan atas:

a) Tingkat pencapaian hasil program yang diinginkan atau manfaat yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau badan lain yang berwenang.

b) Efektivitas kegiatan entitas, pelaksanaan program, kegiatan, atau fungsi instansi yang bersangkutan.

c) Tingkat kepatuhan entitas yang diaudit terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program atau kegiatan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa audit kinerja memilik dua jenis audit yaitu, audit ekonomi dan efisiensi, serta audit program yang memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri.

### 2.1.1.3 Manfaat Audit Kinerja

Manfaat audit kinerja menurut Mahmudi (2007:189) secara lebih spesifik, manfaat dilakukannya audit kinerja bagi organisasi sektor publik antara lain :

1) Meningkatkan pendapatan.

Hal ini karena kebocoran, penggelapan, dan ketidakoptimalan dalam sisi pendapatan bisa diketahui dan diperbaiki.

2) Mengurangi biaya atau belanja.

   Melalui audit kinerja, sumber penyebab kebocoran dan pemborosan organisasi bisa diidentifikasi sehingga melalui efisiensi organisasi dapat melakukan penghematan biaya.

3) Memperbaiki efisiensi dan produktifitas.

   Hal ini juga berarti memperbaiki proses.

4) Memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan.

5) Meningkatkan kesadaran manajemen sektor publik terhadap perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan sumber daya publik.

Dari uraian di atas dapat dijelaskan bahwa audit kinerja bermanfaat untuk mengetahui apakah sumber daya organisasi telah diperoleh dan digunakan secara ekonomis, efisiensi, dan efektif, tidak terjadi pemborosan, kebocoran, salah alokasi, dan salah sasaran serta mencapai tujuan. Selain itu audit kinerja berfungsi untuk mengetahui apakah penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai target dan tujuan telah memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas, tidak melanggar ketentuan hukum, peraturan perundangan, dan kebijakan manajemen. Dengan dilakukannya audit kinerja *stakeholders* sektor publik dapat memperoleh informasi yang obyektif dan independen mengenai kinerja manajemen sektor publik.

Disamping itu, audit kinerja juga bermanfaat untuk mengidentifikasi cara untuk memperbaiki ekonomi, efisiensi, dan efektivitas di sektor publik serta

mendorong dilakukannya perbaikan sistem pengendalian manajemen sektor publik.

### 2.1.1.4 Standar Audit Kinerja Sektor Publik

Menurut I Gusti Agung Rai (2008:49) dijelaskan dalam audit kinerja berlaku standar audit kinerja sektor publik, yaitu:

1) Standar Umum
   a) Pemeriksaan secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan.
   b) Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa, harus bebas dalam sikap mental dan penampilan, dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.
   c) Dalam pelaksanaan pemeriksaan serta penyusunan laporan hasil pemeriksaan, pemeriksa wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama.
   d) Setiap organisasi pemeriksa yang melaksanakan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan harus memiliki sistem pengendalian mutu yang memadai dan sistem pengendalian mutu tersebut harus di review oleh pihak lain yang kompeten (pengendalian mutu eksternal).
2) Standar Pelaksanaan Audit Kinerja

   Standar pelaksanaan audit kinerja terdiri atas empat pernyataan yang berkaitan dengan syarat-syarat dalam merencanakan dan mengawasi pekerjaan di lapangan yang harus dipenuhi.

a) Pekerjaan harus direncanakan secara memadai.

b) Staf harus disupervisi dengan baik.

c) Bukti yang cukup, kompeten, dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi pemeriksa.

d) Pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Dokumen pemeriksaan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pemeriksaan harus berisi informasi yang cukup untuk memungkinkan pemeriksa yang berpengalaman, tetapi tidak mempunyai hubungan dengan pemeriksaan tersebut, dapat memastikan bahwa dokumen pemeriksaan tersebut dapat menjadi bukti yang mendukung temuan, simpulan, dan rekomendasi pemeriksa.

3) Standar Pelaporan Audit Kinerja

Standar pelaporan audit kinerja terdiri atas empat pernyataan yang mencakup syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaporan hasil kegiatan audit.

a) Pemeriksa harus membuat laporan hasil pemeriksaan untuk mengkomunikasikan setiap hasil pemeriksaan.

b) Laporan hasil pemeriksaan harus mencakup:

- pernyataan bahwa pemeriksaan dilakukan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- tujuan, lingkup, dan metodologi pemeriksaan.
- hasil pemeriksaan berupa temuan audit, simpulan, dan rekomendasi.
- tanggapan pejabat yang bertanggungjawab atas hasil pemeriksaan.

- pelaporan informasi rahasia apabila ada.

c) Laporan hasil pemeriksaan harus tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, serta jelas dan seringkas mungkin.

d) Laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada lembaga perwakilan, entitas yang diaudit, pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur entitas yang diaudit, pihak yang bertanggungjawab untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan, dan kepada pihak lain yang diberi wewenang untuk menerima laporan hasil pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**2.1.1.5 Indikator Audit Kinerja Sektor Publik**

Menurut Abdul Halim dan Theresia Damayanti (2007:71) menyatakan bahwa audit kinerja merupakan suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif agar dapat:

1) Melakukan penilaian secara independen, tidak tergantung pada sesuatu lain/tidak bias dalam bersikap. Auditor yang independen akan memungkinkan yang bersangkutan bersikap objektif.
2) Ekonomi, berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas, dan kualitas yang benar. Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolehan input untuk digunakan dalam proses, dengan tetap menjaga kualitas sejalan dengan prinsip dan praktik administrasi yang sehat dan kebijakan manajemen.
3) Efesiensi, merupakan hubungan yang optimal antara *input* dan *output*. Suatu entitas dikatakan efesien apabila mampu menghasilkan *output* maksimal

dengan jumlah *input* tertentu atau mampu menghasilkan *output* tertentu dengan memanfaatkan *input* minimal.

4) Efektivitas, pada dasarnya adalah pencapaian tujuan. Efektivitas berkaitan dengan hubungan antara *output* dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai (*outcome*). Efektif berarti *output* yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.
5) Kepatuhan kepada kebijakan, peraturan dan hukum yang berlaku.
6) Menentukan antara kinerja yang telah dicapai dengan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.
7) Mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak pengguna laporan.

### 2.1.2 Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

#### 2.1.2.1 Pengertian Kualitas Penyajian Laporan Keuangan

Menurut Iman Mulyana (2010:96) definisi kualitas adalah kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian.

Menurut Irham Fahmi (2012:22) mengemukakan bahwa:

> Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan.

Sedangkan menurut Munawir (2007:56) mengemukakan bahwa laporan keuangan sebagai berikut:

> Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh suatu perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2002:4) kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

> Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukan pertanggungjawaban *(stewardship)*.

Sedangkan menurut Munawir (2002:6) penyajian laporan keuangan adalah sebagai berikut:

> Penyajian laporan keuangan oleh perusahaan dimaksudkan untuk memberikan informasi baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif mengenai kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik untuk pihak intern maupun pihak ekstern perusahaan. Laporan keuangan juga dipersiapkan atau dibuat dengan maksud untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan (Progress Report) secara periodik yang dilakukan pihak manajemen yang bersangkutan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka kualitas penyajian laporan keuangan dapat dikatakan kesesuaian memberikan informasi laporan keuangan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukan pertanggungjawaban yang menggambarkan kondisi suatu perusahaan, dimana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh suatu perusahaan yang bersangkutan yang menggambarkan tentang kinerja suatu perusahaan dengan kesesuaian memenuhi standar.

### 2.1.2.2 Indikator Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut Abdul Hafiz (2012:13) karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam kualitas penyajian laporan keuangan sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik ini merupakan syarat dapat dikatakan berkualitas, yaitu:

a) Relevan, jika informasi yang disajikan dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengkoreksi hasil evaluasi dimasa lalu. Informasi yang relevan yaitu:
    1) Memiliki manfaat umpan balik, yaitu informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengkoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.
    2) Memiliki manfaat prediktif, yaitu informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
    3) Tepat waktu, yaitu informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
    4) Lengkap, yaitu informasi yang disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada.
b) Andal, jika informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

1) Penyajian jujur, yaitu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
2) Dapat diverifikasi, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari satu kali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukan simpulan dan tidak berbeda jauh.
3) Netralitas

   Informasi akuntansi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.

c) Dapat dibandingkan, jika informasi yang disajikan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
   1) Perbandingan secara intenal dapat dilakukan bila entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dalam 1 tahun.
   2) Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang dibandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama (antar entitas).
d) Dapat dipahami, jika informasi yang disajikan dapat dimengerti oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

### 2.1.3 Akuntabilitas Publik

#### 2.1.3.1 Pengertian Akuntabilitas Publik

Pengertian akuntabilitas publik menurut Mahmudi (2010:23) adalah:

> Kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*prinsipal*).

Sedangkan Ihyaul Ulum. MD (2004:40) pengertian akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

> Suatu pertanggungjawaban oleh pihak-pihak yang diberi kepercayaan oleh masyarakat atau individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka akuntabilitas publik dapat dikatakan suatu kewajiban yang harus dipertanggungjawaban oleh pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan pemeritah yang diberi kepercayaan oleh masyarakat atau individu dimana nantinya terdapat keberhasilan atau kegagalan di dalam pelaksanaan tugasnya tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### 2.1.3.2 Tahap-tahapan Akuntabilitas Publik

Menurut Mulgan (1997) dalam Abdul Halim (2007:21) di dalam akuntabilitas publik mempunyai tahap-tahapan yaitu:

1) Pelaporan

   Merupakan kewajiban yang dilaksanakan oleh *steward* atau pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan atau melaporkan hasil kinerjanya dalam mengelola dana publik.

2) Pencarian Informasi atau Investigasi

   Merupakan kewenangan dari *owner* atau masyarakat untuk mengetahui bagaimana kinerja *steward* dalam mengelola sumber daya publik.

3) Penilaian atau Verifikasi

   Merupakan kewenangan dari *owner* atau masyarakat untuk menilai kinerja *steward* dalam mengelola sumber daya publik.

4) Pengendalian dan Pengarahan

   Merupakan kewenangan dari *owner* atau masyarakat untuk pencapain kinerja *steward* dalam mengelola sumber daya publik.

Di dalam tata kelola pemerintah yang baik terhadap pengelolaan keuangan daerah tidak bisa dipisahkan dari prinsip-prinsip akuntabilitas publik karena akuntabilitas publik adalah suatu pertanggungjawaban atas kegiatannya di dalam pengelolaan keuangan daerah.

### 2.1.3.3 Jenis-jenis Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2006:5) akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu:

1) Akuntabilitas vertikal (*Vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pertanggungjawaban pemerintah pusat kepada MPR.
2) Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada DPRD dan masyarakat luas.

### 2.1.3.4 Indikator Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2004:105) prinsip-prinsip akuntabilitas publik pada pemerintahan yang baik diantaranya:

1) Transparasi

   Keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, anggaran daerah. Transparasi juga memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat terutama pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

2) Akuntabilitas

   Akuntabilitas berarti dari perencanaan, pelaporan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat.

3) *Value for money*

   Berarti telah ditetapkan tiga prisnsip di dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Efektivitas Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik

Adapun peneliti mendapatkan teori yang menghubungkan antara audit kinerja sektor publik terhadap akuntabilitas publik sebagai berikut:

Menurut I Gusti Agung Rai (2008:24) menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara audit kinerja sektor publik dan akuntabilitas publik yaitu:

> Audit yang dilakukan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti untuk menilai kinerja entitas yang di audit dalam hal ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dengan tujuan untuk

> memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit dan meningkatkan akuntabilitas publik.

Menurut Mardiasmo (2004:193) pentingnya audit kinerja dalam menunjang akutabilitas publik tujuan *value for money* audit untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga sektor publik dan untuk memperbaiki kinerja pemerintah. Menurut Indra Bastian (2007:48) menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara audit kinerja terhadap akuntabilitas publik yaitu:

> Audit kinerja dapat meningkatkan tingkat akuntabilitas pemerintah dan memudahkan pengambilan keputusan oleh pihak yang bertanggungjawab untuk mengawasi dan memprakarsai tindakan koreksi.

Sedangkan menurut Mahmudi (2007:190) pentingnya audit kinerja dalam menunjang akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

> Untuk menciptakan proses akuntabilitas yang baik diperlukan saluran pertanggungjawaban *(chanel of accountability)*. Salah satu fungsi yang ada dalam proses akuntabilitas publik tersebut adalah proses pemeriksaan atau pengauditan.

Menurut Deddy Supardi, Sherly Wiarty (2010:92) jika audit kinerja baik maka akuntabilitas publik akan baik audit kinerja mempunyai peranan yang signifikan dan positif dalam menunjang akuntabilitas publik. Sedangkan menurut Lintje Kalangi (2012:7) Manfaat adanya audit sektor publik adalah terjaminnya tranparansi, terjaminnya akuntabilitas berorientasi pada hasil.

Berdasarkan teori-teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya di atas, maka dapat dikatakan bahwa Efektivitas Audit Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik. Audit kinerja dengan tujuan untuk memperbaiki kinerja dan entitas yang diaudit akan meningkatkan akuntabilitas publik.

### 2.2.2 Pengaruh Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2002:21) keterkaitan kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik adalah sebagai berikut:

> Akuntabilitas publik merupakan pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah atas aktivitas-aktivitas dan kinerja keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, melalui penyajian laporan keuangan yang baik, pelaporan keuangan daerah akan dapat dipertanggungjawabkan sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Menurut Putu Sri Wahyuni, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Nyoman Trisna Herawati (2010) pengaruh kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik adalah:

> Semakin baik pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan maka akuntabilitas laporan keuangan pemerintah akan meningkat. Untuk meningkatkan akuntabilitas publik, pemerintah perlu mengakses laporan keuangan yang dibuatnya agar masyarakat dengan mudah memperoleh laporan keuangan tersebut.

Menurut Anies Iqbal Mustofa (2012:2) Kurangnya pemerintah dalam melaksanakan akuntabilitas untuk sekarang ini menyebabkan:

> laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang kurang lengkap itu secara mudah menurunkan kualitas dari akuntabiltas laporan keuangan daerah.

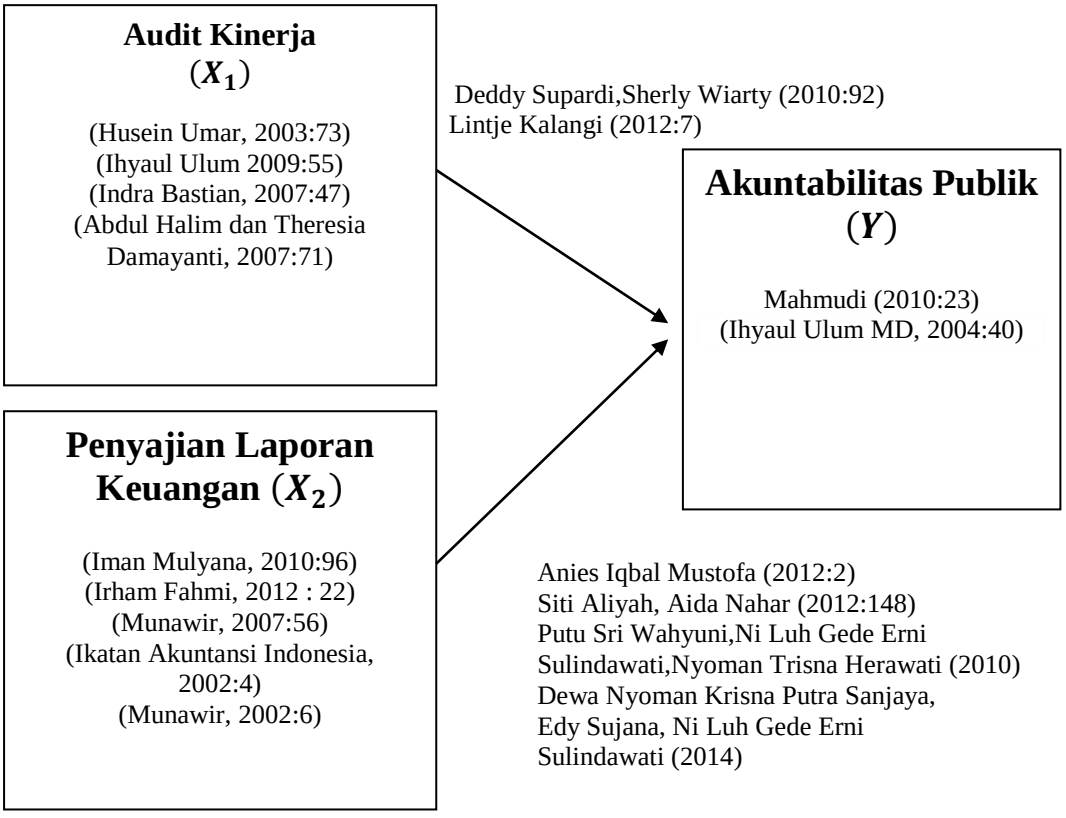
Siti Aliyah, dan Aida Nahar (2012:148) pengaruh kualitas penyajian laporan keuangan terhadap akuntabilitas publik adalah:

> Penyajian laporan keuangan daerah secara lengkap yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan memungkinkan kontrol dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan bisa berjalan dengan baik. Hal ini akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Menurut Dewa Nyoman Krisna Putra Sanjaya, Edy Sujana, Ni Luh Gede Erni Sulindawati (2014) pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri.

Berdasarkan teori-teori penghubung dan hasil penelitian sebelumnya di atas, maka dapat dikatakan bahwa kualitas penyajian laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Kualitas penyajian laporan keuangan yang tinggi dapat meningkatkan akuntabilitas publik pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menuangkan kerangka pemikirannya dalam bentuk skema paradigma penelitian sebagai berikut:




**Gambar 2.1**
**Skema Paradigma Penelitian**

## 2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2014:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

> Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta –fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran diatas, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian sebagai berikut:

$H_{1:}$ Efektivitas Audit Kinerja berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik.

$H_{2:}$ Kualitas Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Publik